



## **BUPATI BULUNGAN**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN**

**NOMOR 198 /K-III/ 420 /2011**

**TENTANG**

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1  
TANJUNG PALAS DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BULUNGAN**

**BUPATI BULUNGAN**

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan Ksbupsten Bulungan Nomor : 422./633/Disdik.III/2011, Perihal Permohonan diterbitkan SK Pendirian SMK Negeri 1 Tanjung Palas.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan untuk mensukseskan gerakan nasional wajib belajar, maka perlu mendirikan sekolah baru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan;
- b. bahwa sekolah baru tersebut adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Tanjung Palas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Tanjung Palas Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008, Nomor 1);

Memperhatikan : Surat penunjukan Bupati Bulungan Nomor 593/003/Tapem-III/IV/2007 tanggal 24 April 2007

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK) I Tanjung Palas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan sebagai Berikut :

- |    |                  |   |                            |
|----|------------------|---|----------------------------|
| 1. | NAMA SEKOLAH     | : | SMK NEGERI 1 TANJUNG PALAS |
| 2. | NSS              | : | 40.1.16.04.02.001          |
| 3. | ALAMAT           | : | Jl.PUSKESMAS               |
| 4. | TAHUN BERDIRINYA | : | 10 FEBRUARI 2011           |
| 5. | KECAMATAN        | : | TANJUNG PALAS              |

- KEDUA : Sekolah baru sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam menjalankan kegiatan administrasi dan proses belajar mengajar agar senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pelaksanaan Penerimaan siswa baru pada sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai pada tahun pembelajaran 2011/2012 dan pelaksanaan operasional sekolah dengan mengikuti ketentuan Penerimaan Siswa Baru (PSB) yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 10 Maret 2011

**BUPATI BULUNGAN,**

td

**BUDIMAN ARIFIN**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

01. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta.
02. Kepala Biro Organisasi Setjen Depdiknas di Jakarta.
03. Direktur PLP Ditjen Dikdasmen di Jakarta.
04. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
05. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
06. Ketua DPRD Kabupaten Bulungan di Tanjung selor.
07. Kepala Bappeda Kabupaten Bulungan di Tanjung selor.
08. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor.
09. Kepala DPKD Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor.
10. Kepala BKD Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor.
11. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor.
12. Camat Tanjung Palas di Desa Gunung Putih.
13. Arsip

